

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi pemerintah yang disertai dengan keterbukaan sudah menjadi tuntutan di Indonesia. Hal ini menyebabkan semakin menguatnya tuntutan aspek transparansi dan akuntabilitas. Kedua aspek tersebut menjadi penting dalam pengelolaan Keuangan Negara maupun Daerah. Hal itulah yang mendorong terjadinya proses peralihan dari sistem dekosentrasi ke sistem desentralisasi yang disebut otonomi. Dengan terselenggarakan otonomi daerah dimaksudkan untuk menuntut Pemerintah Daerah mengatur pemerintahnya secara mandiri, termasuk mandiri dalam masalah keuangan Pemerintah. Otonomi daerah merupakan bagian dari desentralisasi. Dengan adanya otonomi daerah hal ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan bahwa kemampuan dalam mengatur serta melaksanakan kewenangan yang menjadi hak masing-masing daerah, Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang No. 32 tahun 2004. Adapun tujuan Otonomi daerah Menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004 yaitu, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat didaerah kekuasaannya dan untuk meningkatkan daya saing daerah.

Reformasi saat ini juga di segala bidang, termasuk dalam bidang pemerintahan mendorong pemerintah untuk mempunyai kinerja yang lebih efektif dan efisien dari tahun-tahun sebelumnya. Tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap terwujudnya pemerataan pembangunan memaksa pemerintah merubah tatanan lembaga publik di

Indonesia. Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 yang kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang dititik beratkan pada daerah Kabupaten dan kota akan memberikan kewenangan yang luas Kepada Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup kewenangan di bidang politik, luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan di bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi atau Desentralisasi perlu dilakukan karena tidak ada suatu pemerintahan dari suatu Negara yang luas mampu secara efektif membuat kebijakan publik disegala bidang atau mampu melaksanakan kebijakan tersebut secara efisien di seluruh wilayah tersebut. Dengan adanya Desentralisasi diharapkan beban pemerintah pusat dapat berkurang. Desentralisasi juga diharapkan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Dari sudut Pemerintah Daerah, dengan adanya desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan tanggung jawabnya kepada kepentingan masyarakat daerah, sekaligus memberikan akses kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasinya dalam mengendalikan pemerintahan. dengan desentralisasi diharapkan responsivitas yaitu kemampuan untuk melayani apa yang diinginkan masyarakat oleh pemerintah daerah dapat ditingkatkan. Otonomi daerah menekan adanya peran serta kemampuan pemerintah daerah dalam pembangunan

dan juga pengelolaan keuangan daerah yang diupayakan semakin membaik. Pengelolaan keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah (Askam, 2008).

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diatur oleh undang-undang No. 58 tahun 2005 dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan Daerah. Menurut Elsy (2016), pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dari seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Sesuai dengan adanya otonomi daerah maka daerah-daerah harus mengelola keuangan daerahnya secara baik. Menurut Mardiasmo (2002), perimbangan tanggung

jawab akan di ikuti oleh pengaturan, pembagian, pemanfaatn dan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Oleh karena itu pengelolaan keuangan yang dilakukan dengan efisien dan efektif harus dilakukan secara optimal, karena hal ini berkaitan dengan target dan realisasi penerimaan daerah, dan ternyata realisasi seringkali tidak sesuai dengan target. Pengelolaan keuangan sudah efisien dan efektif berarti adanya suatu jaminan ketersediaan dana pembangunan, dan jika pengelolaannya belum efisien dan efektif maka perlu untuk didorong lagi agar supaya pengelolaan akan lebih membaik dan ini akan menjamin ketersediaan dana untuk pembangunan itu sendiri, sehingga hal ini akan menjamin kemandirian keuangan daerah semakin lama semakin baik.

Menurut Mardiosmo (2017), Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapain tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan Efektif. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Apabila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya, maka sasaran dan tujuan tersebut Efektif. Berdasarkan pengertian para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa Efektivitas adalah tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.

Menurut Mulyadi (2007), Efisiensi adalah ketetapan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya. Efisiensi juga berarti rasio antara input dan output atau biaya dan keuntungan.

Menurut Mahamudi 2010 Efisiensi adalah usaha mencapai prestasi yang besar-besarnya dengan menggunakan kemungkinan-kemungkinan yang tersedia (material, mesin, dan manusia) dalam tempo yang sependek-pendeknya didalam keadaan yang nyata tanpa mengganggu keseimbangan antara faktor-faktor tujuan, alat, tenaga dan waktu. Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara suatu hasil (Output) dengan usahanya (input). Berdasarkan pengertian para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa efisiensi adalah suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Suatu daerah otonom diharapkan mampu atau mandiri didalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat dan pendapatan asli daerah harus menjadi bagian yang terbesar dalam memobilasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila PAD dijadikan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah demi mewujudkan tingkat kemandirian dalam menghadapi otonomi daerah.

Untuk mengembangkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan manajemen keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah melakukan optimalisasi pendapatan asli daerah yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan. Dalam rangka pertanggungjawaban tersebut kita perlu mengetahui tujuan pendapatan daerah (PAD).

Pendapatan asli daerah (PAD) bertujuan untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian daerah serta memperkuat struktur keuangan daerah karena merupakan salah satu tolak ukur/indikator kemampuan dan cermin kemandirian daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan indikator kemandirian suatu daerah. Artinya semakin meningkatnya proporsi penerima PAD terhadap keseluruhan penerimaan pendapatan daerah yang ditunjukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), maka daerah tersebut menunjukkan kemandirian dalam hal pembiayaan pembangunan daerahnya.

Menurut Halim (2002), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari berbagai sumber yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Hubungan tersebut tidak hanya bersifat keuangan, tetapi juga berhubungan dengan faktor-faktor lain yang dapat dilihat dari tiga segi, yaitu penyelenggaraan pemerintah di daerah, pelaksanaan kebijakan pembangunan di daerah, dan pengawasan di daerah. Berdasarkan pengertian para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Muhamad Habibi Wahid (2012), dengan judul Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Upaya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Takalar kurun waktu 3 tahun yaitu pada tahun 2011 sampe dengan Tahun 2014. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa rasio efektivitas pendapatan asli daerah kabupaten takalar

selama 3 tahun yaitu tahun 2012 samapai tahun 2014 rata-rata sebesar 90,29 persen, rasio efesiensi pendapatan asli daerah kabupaten takalar selama tahun 2012 sampai tahun 2014 rata-rata sebesar 3,78 persen.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tiurma Rosmauli Sitompul (2018), Penelitiannya berjudul analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah berdasarkan potensi rill daerah dalam setiap tahun anggaran sudah sangat baik . Sedangkan rata-rata tingkat efisiensi pengelolaan keuangan pada dinas pendapatan daerah selama periode tahun anggaran yang sama dinyatakan kurang efisien dikarenakan pengeluaran daerah yang masih tinggi jika dibandingkan dengan total penerimaan daerah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Novlie Manopo tahun 2017, penilitiannya berjudul Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam mengelola keungan daerah menjadi efektif pada periode Kabupaten Minahasa Tenggara.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kota Kupang”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “ Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kota Kupang”

1.3. Persoalan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini memiliki persoalan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Tingkat Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kota Kupang.
2. Bagaimana Tingkat Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kota Kupang.

1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji Tingkat Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada kota kupang.
2. Untuk menguji Tingkat Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kupang.

1.4.2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat menambah wawasan serta pemahaman peneliti dibidang akuntansi khususnya penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap instansi pemerintah.

b. Manfaat Praktis

Bagi Badan keuangan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Daerah Kota Kupang untuk meningkatkan tingkat Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah pada kota kupang.

1. Bagi peneliti, Hasil penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan menjadi wahana dalam menerapkan ilmu yang dipelajari khususnya akuntansi sektor publik.
2. Bagi pihak lain, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi, sumber informasi dan sebagai pembanding untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan judul ini.